BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.[1] Setiap pembangunan ekonomi diharapkan dapat berpengaruh dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan total output dalam perekonomian yang didefinisikan oleh beberapa ekonom sebagai peningkatan *Gross Domestic Product* (GDP) riil per kapita.[2] *Gross Domestic Product (*GDP) dalam bahasa Indonesia diebut sebagai Produk Domestik Bruto, yakni hasil nilai output seluruh produksi yang ada di wilayah negara tersebut dalam satu tahun, berupa barang jadi atau jasa akhir. Di dalam teori-teori konvensional, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari faktor-faktor produksi, seperti kapital atau modal, sumber daya manusia, teknologi, bahan baku, *entrepreneurship,* dan energi.[3]

Industri keuangan merupakan instrumen yang memiliki urgensi strategis dalam sebuah negara. Sektor keuangan tidak hanya berkontribusi langsung terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), bahkan juga ikut berkontribusi besar bagi perekonomian dan masyarakat pada umumnya melalui

---

[1] M. Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, ed.6 (Yogyakarta: BPFE, 2002), 5.

[2] Karl E. Case dan Ray C. Fair, *Prinsip-Prinsip Ekonomi,* dalam Tan S. D. Alatan dan Sautma R. Basana, "Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Ekonomi Regional Jawa Timur", *FINESTA,* Vol. 3, No. 1 (2015), 63.

[3] Tulus T.H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2001), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan intermediasi keuangan (*financial intermediation*). Melalui proses intermediasi keuangan, sektor jasa keuangan berperan penting dalam mobilisasi dan mengalokasikan dana dari *surplus unit* ke *deficit unit* sehingga akan menggerakkan dan mendukung perekonomian nasional.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan optimal apabila stabilitas industri keuangan negara tersebut dapat terpelihara dengan baik. Di Indonesia, industri keuangan masih didominasi oleh perbankan. Hal ini menimbulkan tingginya ketergantungan kepada perbankan sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan perekonomian. Dengan demikian, apabila perbankan tidak dapat menyalurkan pendanaan kepada sektor riil, maka pengaruh kelambatan pertumbuhan ekonomi menjadi terasa.

Dalam suatu sistem ekonomi modern, perbankan memiliki peran strategis dalam perekonomian suatu negara. Disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat".[4] Kemudian berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, "Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[5] Dilanjutkan lagi, berdasaran pasal 1 ayat 7 UU No. 20 tahun

[4] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah".
[5] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2008, "Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".[6] Hal ini menunjukkan bahwa perbankan menyediakan salah satu faktor produksi yakni kapital. Undang-undang tersebut secara tegas juga menyatakan bahwa Indonesia menganut *dual banking system* dalam sistem perbankan nasional dengan diakuinya kehadiran bank dengan prinsip syariah untuk beroperasi, baik sebagai Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah dari bank konvensional.

Hadirnya perbankan syariah di Indonesia dipelopori dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992. Dari kurun waktu tersebut, perbankan syariah berkembang dengan pesat terlihat dari banyaknya bank umum syariah lainnya yang lahir maupun pembukaan unit usaha syariah dari bank konvensional. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berperan menyalurkan dana masyarakat ke dalam investasi aset produktif yang akan mendorong produktivitas sektor riil, akumulasi modal kapital, dan pengeluaran agregat kemudian berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Adiwarman Karim, Indonesia merupakan *the biggest retail Islamic Banking.*[7] Hal ini didukung dengan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Juli tahun 2016, 1799 jaringan kantor yang dioperasikan oleh 12 Bank Umum Syariah (BUS). Sedangkan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki 328 jaringan kantor yang dioperasikan oleh 22 UUS. Ditambah lagi dengan jaringan

---

[6] Presiden Republik Indonesia, "Undang-undang No. 20 ...".

[7] Adiwarman Azwar Karim menyampaikan dalam presentasinya yang berjudul "Islamic Financial Inclusion", disampaikan di Seminar Keuangan Inklusif dalam rangka *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF) 2014, 7 November 2014 di Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang mencapai 270 kantor. Sementara itu, dari sisi aset, total aset BUS dan UUS di Indonesia pada akhir Juli 2016 mencapai Rp 305,542 triliun.[8]

Tabel 1.1 Data Sebaran Jaringan Kantor BUS dan UUS Bank Syariah

Kelompok Bank	KPO/KC	KCP/UPS	KK
Bank Umum Syariah	456	1.161	182
Unit Usaha Syariah	149	135	44
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	97	-	173
TOTAL	702	1.296	339

Keterangan:
- KP = Kantor Pusat
- KC = Kantor Cabang
- UUS = Unit Usaha Syariah
- KCP/UPS = Kancab Pembantu/ Unit pelayanan Syariah
- KPO = Kantor Pusat Operasional
- KK = Kantor Kas

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, Desember 2015, diolah.

Survai lain, berdasarkan penilaian *Islamic Bankers Asociation* yang terangkum dalam *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2015, ranking Indonesia dalam IFCI (*Islamic Finance Country Index*) berada di urutan ketujuh negara yang memiliki potensi dan kondusif dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Kuwait dan Bahrain. Penilaian tersebut didapat dari beberapa aspek dalam penghitungan indeks, seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun ukuran aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar.[9] Hal ini tentu menjadi potensi besar perbankan syariah untuk berperan dalam kontribusinya menumbuhkan perekonomian Indonesia.

[8] Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Perbankan Syariah", Juli 2016.

[9] Islamic Bankers Asociation, "Global Islamic Finance Report 2015", 47, dalam http://www.gifr.net/gifr2015/ch_02.pdf, diakses pada 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Grafik 1.1 Pertumbuhan Jumlah Penyaluran Dana Pembiayaan oleh BUS-UUS dan Pertumbuhan PDB Indonesia

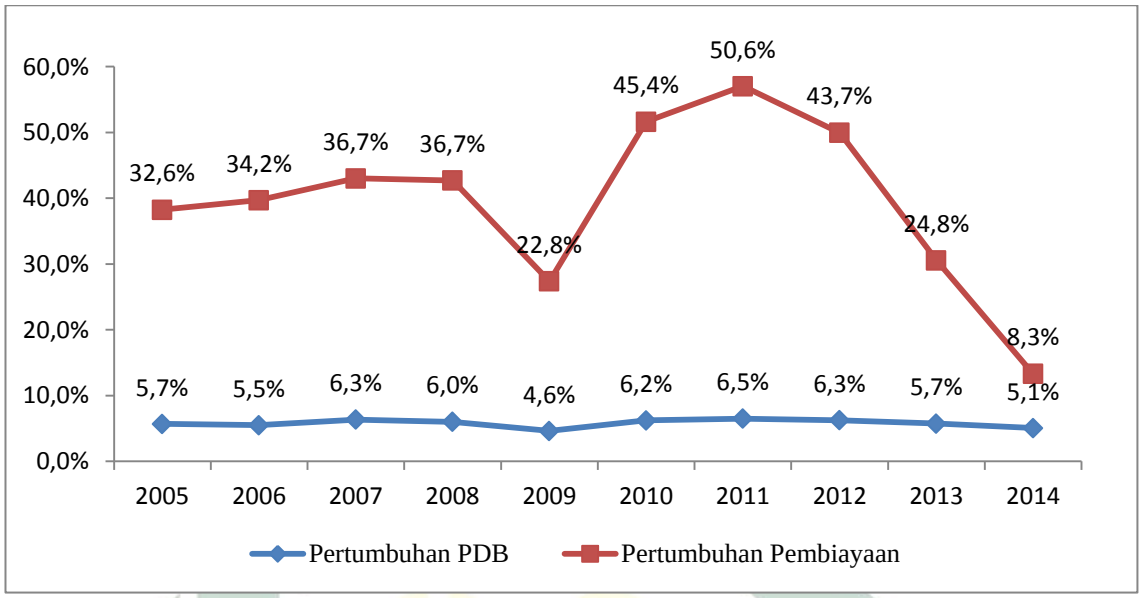

Sumber: OJK dan BPS, diolah

Grafrik 1.1 Menunjukkan bahwa pertumbuhan pembiayaan oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia secara umum memiliki nilai yang cukup tinggi pada periode tahun 2005-2012. Pada periode 2012, pertumbuhan pembiayaan oleh BUS dan UUS mencapai sebesar 50,6% dengan total penyaluran dana pembiayaan Rp 147,5 Triliun. Namun kemudian pertumbuhan pembiayaan melambat pada periode tahun 2013-2015. Pada tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan oleh BUS dan UUS sebesar 6,9% dengan jumlah alokasi dana pembiayaan Rp 213 Triliun. Sementara itu, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia relatif stagnan di kisaran 5%-6%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.2 Distribusi Produk Domestik Bruto Indonesia Tahun 2013-2014 (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2013		2014	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	339.561	12,26%	350.722	12,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	195.853	7,07%	195.425	6,72%
3	Industri Pengolahan	707.482	25,55%	741.836	25,50%
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	21.255	0,77%	22.424	0,77%
5	Bangunan	182.118	6,58%	194.093	6,67%
6	Perdagangan, Hotel, dan Restoran	501.041	18,09%	524.310	18,02%
7	Pengangkutan dan Komunika	291.404	10,52%	318.528	10,95%
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	272.142	9,83%	288.351	9,91%
9	Jasa - Jasa	258.198	9,32%	273.493	9,40%
Produk Domestik Bruto		2.769.053	100,00%	2.909.182	100,00%

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Produk Domestik Bruto Indonesia tahun 2014 mencapai Rp 2.909 Triliun, naik 5,1% dari tahun 2013 yakni Rp 2.769 Triliun. Rincian pendapatan nasional dalam hal ini adalah Produk Domestik Bruto berdasarkan sektor dapat menerangkan struktur perekonomian suatu negara. Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor ekonomi Indonesia, berdasarkan klasifikasi sektor ekonomi Badan Pusat Statistik, didominasi oleh sektor Industri Pengolahan; Perdagangan, Hotel, dan Restoran; serta Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan.

Di sisi lain, tujuan utama perbankan syariah adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Untuk merealisasikannya, kegiatan perbankan harus terfokus pada kegiatan produksi.[10] Dalam mendukung hal tersebut, perbankan syariah melalui BUS, UUS, dan BPRS memberikan pembiayaan terhadap sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sektor lapangan usaha yang diberikan pembiayaan oleh perbankan syariah menurut publikasi

[10] Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan meliputi sektor: a) pertanian, perburuan, dan kehutanan; b) perikanan; c) pertambangan dan penggalian; d) industri pengolahan; e) listrik, gas, dan air; f) konstruksi; g) perdagangan besar dan eceran; h) penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum; i) transportasi, pergudangan, dan komunikasi; j) perantara keuangan; k) real estate, usaha persewaan, dan jasa perusahaan; l) administrasi pemerintahan, pertahanan, dan, jaminan sosial wajib; m) jasa pendidikan; n) jasa kesehatan dan kegiatan sosial; o) jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan, dan perorangan lain; p) jasa perorangan yang melayani rumah tangga; q) badan internasional dan badan ekstranasional laainnya; dan r) kegiatan yang belum jelas batasannya.

Tabel 1.3 Jumlah Pembiayaan Sektor Lapangan Kerja oleh BUS dan UUS per Juli 2016 (milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	Pembiayaan	Prosentase
1	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	7.832	5,80%
2	Perikanan	1.354	1,00%
3	Pertambangan dan Penggalian	6.426	4,76%
4	Industri Pengolahan	17.839	13,21%
5	Listrik, gas dan air	7.152	5,30%
6	Konstruksi	11.046	8,18%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	27.777	20,57%
8	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	2.723	2,02%
9	Transportasi, pergudangan dan komunikasi	10.925	8,09%
10	Perantara Keuangan	19.643	14,54%
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	10.051	7,44%
12	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sos. Wajib	263	0,19%
13	Jasa Pendidikan	3.468	2,57%
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.684	1,99%
15	Jasa Kemasyarakatan, Sos. Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	4.617	3,42%
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	329	0,24%
17	Badan Intl' dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	0,00%
18	Kegiatan yang belum jelas batasannya	931	0,69%
	Jumlah	135.060	100%

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Juli 2016, diolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan oleh BUS dan UUS di Indonesia per Juli 2016 untuk lapangan usaha adalah sebesar Rp 135, 06 Triliun dari total pembiayaan keseluruhan Rp 220,143 Triliun. Pembiayaan tersebut didominasi untuk pembiayaan sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 20,57%.

Tabel 1.4 Program Nawacita dan Proxy Sektor Ekonomi

No	Kode	Dimensi Program Nawacita	Sektor Ekonomi
1	AGRIFISH	Mewakili ketahanan pangan (Nawacita	Pertanian, kehutanan, dan perikanan
2	MINING	Ketahanan Energi	Pertambangan dan penggalian
3	INDUST	Peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor	Industri Pengolahan
4	CONST	Program infrastruktur pendukung	Konstruksi

Sementara itu, sektor-sektor yang termasuk dalam program "Nawacita"[11] yaitu: 1) pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 2) konstruksi; 3) pertambangan dan penggalian; dan 4) industri pengolahan tidak mendapatkan distribusi alokasi pembiayaan signifikan. Pembiayaan untuk ketahanan pangan yakni sektor pertanian misalnya, hanya 4,58% dari total pembiayaan. Sektor perikanan jauh lebih sedikit, yakni hanya 1%. Begitupun dengan sektor pertambangan yang hanya 4,78% dari total pembiayaan. Hal ini sangat disayangkan mengingat sektor-sektor tersebut merupakan andalan Indonesia.

Melihat berbagai masalah tersebut, menjadi hal menarik untuk dikaji apakah pertumbuhan pembiayaan tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini diwakili oleh Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya

[11] "Nawacita" adalah 9 agenda prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodountuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam bidang ekonomi, dimensi program "Nawacita" adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor, serta program infrastruktur pendukung.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan antara pembiayaan atau kredit sektor perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi juga telah didukung oleh penelitian terdahulu. Dalam tataran analisis tingkat negara, penelitian Rajan dan Zingales (1998) memberikan dukungan terhadap dampak positif kredit perbankan terhadap pertumbuhan pendapatan per kapita, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Sari (2006) dan Baroroh juga mendapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tedapat hubungan positif anatara alokasi kredit dengan pertumbuhan ekonomi. Secara terpisah, studi lain menyatakan bahwa pemberian kredit tidak selalu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian dari Augier dan Sudarmono (2011) menyatakan bahwa pemberian kredit hanya berpengaruh positif terhadap negara dengan kualitas fundamental ekonomi yang baik. Beberapa penelitian baru justru menunjukkan bahwa kredit perbankan dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alatan dan Basana (2015), menunjukan bahwa tidak seluruh sektor ekonomi di Jawa Timur signifikan dan memberikan pengaruh positif terhadap PDRB. Sementara Arcand et al. (2012) dan Samargandi et al. (2015) menunjukkan bahwa sampai tingkatan tertentu, peningkatan kredit perbankan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Apabila secara agregat alokasi kredit terlampau besar, maka peningkatan kredit dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi karena terdapat *productivity shift effects* dari sektor riil ke sektor finansial.

Berdasarkan hal di atas, analisis pengaruh pembiayaan perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini produk Domestik Bruto (PDB) masih relevan untuk dikaji lebih mendalam, khususnya di negara berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan sistem finansial yang masih didominasi sektor perbankan. Karakteristik industri perbankan di Indonesia sangat relevan untuk topik penelitian, khususnya karena perbankan Indonesia dianggap relatif paling rapuh di ASEAN-5 (Soedarmono et al., 2015). Selain itu, secara umum rasio kredit perbankan Indonesia per tahun 2013 terhadap PDB masih di posisi 31%, jauh lebih kecil dari negara tetangga yang mampu mencapai rasio di atas 100%, seperti Malaysia yang mampu mencapai rasio kredit perbankan sebersar 115,9%, Vietnam sebesar 111,6%, dan Tahiland sebesar 131,9%.[12]

Penelitian ini akan memberikan pendalaman terhadap isu tersebut dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, dalam hal ini tataran lebih sempit dengan objek Provinsi Jawa Timur. Hal ini menarik karena Jawa Timur adalah salah satu *market leader* perekonomian syariah di Indonesia. Kontribusi perbankan syariah di provinsi Jawa Timur ditunjukkan dengan banyaknya pembiayaan terhadap berbagai sektor. Per bulan Juli 2016, Jawa Timur menempati posisi ketiga, berada di bawah DKI Jakarta dan Jawa Barat, dalam pembiayaan sektoral terbanyak se-Indonesia sejumlah Rp 12,67 Triliun.

[12] Desy Saputra, "BI Harapkan Rasio Kredit Perbankan Meningkat", 19 Februari 2013, di http://www.antaranews.com/berita/359146/bi-harapkan-rasio-kredit-perbankan-meningkat, diakses pada 16 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.5 Tiga Besar Provinsi dengan Alokasi Pembiayaan Terbesar di Indonesia bulan Juli 2016 (milyar Rupiah)

Sektor Ekonomi	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Timur
Pertanian, perburuan dan Kehutanan	3.662	289	196
Perikanan	728	141	68
Pertambangan dan Penggalian	5.475	72	54
Industri Pengolahan	9.022	1.305	2.732
Listrik, gas dan air	6.397	266	55
Konstruksi	4.296	1.810	1.364
Perdagangan Besar dan Eceran	9.315	4.533	3.286
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	1.123	467	159
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	6.945	798	770
Perantara Keuangan	11.250	1.313	1.715
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5.182	1.652	1.018
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	251	0	2
Jasa Pendidikan	1.036	625	307
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	735	302	386
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	1.370	830	443
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	31	54	59
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-
Kegiatan yang belum jelas batasannya	291	212	61
Total	67.108	14.668	12.674

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah, Juli 2016. Diolah

Pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang selama ini berlangsung dan dilaksanakan secara menyeluruh serta berkesinambungan dalam beberapa periode juga menunjukan perkembangan yang cukup positif. Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur selalu mengalami pertumbuhan di atas nasional selama lima tahun terakhir sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi Jawa Timur lebih kondusif dibanding rata-rata seluruh provinsi. Hal ini tentu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat secara langsung maupun secara tidak langsung meningkatkan perekonomian masyarakat. Kontribusi PDRB Jawa timur terhdap PDB nasional juga cukup tinggi mencapai 14,50%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.6 Prosentasi Kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional Indonesia

	Provinsi/*Province*	2011	2012	2013	2014*	2015**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indonesia/*Indonesia*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Jawa/*Java*	**56,70**	**56,69**	**57,06**	**57,39**	**58,29**
1.	DKI Jakarta	15,64	15,79	16,10	16,47	17,02
2.	Jawa Barat	13,06	13,01	13,11	12,97	13,09
3.	Jawa Tengah	8,85	8,70	8,64	8,66	8,70
4.	DI Yogyakarta	0,91	0,89	0,88	0,87	0,87
5.	Jawa Timur	14,32	14,40	14,39	14,41	14,50
6.	Banten	3,91	3,90	3,93	4,01	4,10

** Angka sementara/Preliminary Figures*
*** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures*

Sumber: BPS Jawa Timur, 2015

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa pembiayaan sektor-sektor ekonomi dari perbankan syariah sebagai media intermediasi penyaluran dana modal apakah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Penelitian ini fokus pada dampak pemberian pembiayaan kepada PDRB sektor-sektor ekonomi. Dalam kaitan tersebut, juga dilakukan *proxy* terhadap program "Nawacita" yaitu: 1) pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan; 2) konstruksi; 3) pertambangan dan penggalian; dan 4) industri pengolahan untuk diteliti pengaruh pembiayan terhadap PDRB sektor per sektor. Selain itu juga akan dianalisa faktor apa saja yang mempengaruhi besar kecilnya peran pembiayaan perbankan syariah Provinsi Jawa Timur terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berjudul "Pengaruh Alokasi Pembiayaan Sektor-sektor Ekonomi oleh Perbankan Syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur" akan dibahas mendalam pada bab-bab berikutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Adakah pengaruh pembiayaan sektor ekonomi Nawacita secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur?
2. Adakah pengaruh pembiayaan sektor ekonomi Nawacita secara sektor per sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Nawacita Provinsi Jawa Timur?
3. Faktor apa yang menyebabkan besarnya kontribusi pembiayaan sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pembiayaan sektor ekonomi Nawacita terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pembiayaan sektor ekonomi Nawacita secara sektor per sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Nawacita Provinsi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan besarnya kontribusi pembiayaan sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur.

D. Kegunaan Hasil Peneltian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek berikut ini:

1. Aspek teoretis

   Menambah wawasan dan menyempurnakan pengetahuan keilmuwan bagi peneliti mengenai pengaruh pembiayaan terhadap pertumbuhan ekonomi regional yang dalam hal ini diwakili oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang relevan dengan materi ini serta menambah khasanah kepustakaan, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

2. Aspek praktis

   Pada tataran praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan suatu masukan atau wawasan serta evaluasi secara mendalam mengenai peran pembiayaan perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi. Besar kecilnya peran yang diberikan dapat menjadi evaluasi untuk peningkatan kontribusi yang lebih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id